OMBUDSMAN BABEL MONITORING PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI BATENG, BEGINI HASILNYA

Kamis, 26 Oktober 2023 - Agung Nugraha

AYOBANGKA.COM - Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy, memonitoring pelaksanaan "policy brief" hasil kajian cepat pihaknya terkait penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah.

Dari hasil monitoring yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Bangka Tengah, Rabu (25/10/2023), dalam leterangan resmi yang diterima redaksi Ayobangka Com, Yozar menjelaskan bahwa dokumen hasil analisis dan rekomendasi kebijakan terkait upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan atau secara khusus menyasar pada penanganan anak putus sekolah, sebelumnya sudah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah, akhir Agustus 2023.

Pemprov Babel Gandeng CSR Perusahaan, Simak Bermacam Agenda HUT Provinsi ke-23Tarif Ferry Tj Kalian-Tj Api Api Naik, Mulai 3 November Berlaku Beli Tiket Online di SiniEkspose Laporan Akhir Dokumen RP3KP Babel, Bidang Cipta Karya Minta Masukan dari OPD Terkait

"Secara resmi kita sudah sampaikan policy brief dan saran kebijakan dimaksud kepada Pak Sekda, untuk selanjutnya kami harap dapat memperoleh gambaran serta evidence pelaksanaannya," ungkap Yozar.

Menanggapi Yozar, Sekretaris Dinas Pendidikan Bangka Tengah, Pangihutan Sihombing menjelaskan secara terperinci progres tiga poin saran kebijakan yang telah disampaikan oleh Ombudsman untuk segera ditindaklanjuti.

"Saran pertama dan kedua terkait penerbitan Perbup serta SK Pembentukan Satgas Khusus lintas sektor, telah selesai tinggal menunggu ditandatangani bapak bupati. Selanjutnya saran ketiga terkait validasi data dan intervensi terhadap anak putus sekolah sedang proses pendataan dan verifikasi dibantu oleh tenaga pendidikan PAUD yang ada di tiap desa," ungkap Sihombing.

Terkait Sihombing, Yozar mengapresiasi terhadap progres pelaksanaan saran kajian tersebut. "Melalui draf Perbup dan SK Satgas ini dapat kita lihat komitmen tinggi Pemkab Bangka Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Peran Disdik juga cukup vital yaitu terkait validitas data. Kami harap nanti data tersebut dapat terverifikasi sesuai kondisi lapangan dan informasi kasuistik penyebab anak putus sekolah dapat tergambar secara detail agar kerja Tim Satgas nantinya dapat lebih efektif," ujar dia.

Untuk diketahui, sebelumnya Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan tiga saran kebijakan sebagai pedoman Pemkab Bangka Tengah dalam menangani anak putus sekolah secara sistematis.

Pemprov Babel Gandeng CSR Perusahaan, Simak Bermacam Agenda HUT Provinsi ke-23Tarif Ferry Tj Kalian-Tj Api Api Naik, Mulai 3 November Berlaku Beli Tiket Online di SiniEkspose Laporan Akhir Dokumen RP3KP Babel, Bidang Cipta Karya Minta Masukan dari OPD Terkait

Pertama, Ombudsman mengharapkan agar Pemkab Bangka Tengah menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Kepala Daerah tentang pencegahan dan penanganan anak putus sekolah yang didalamnya memuat mekanisme prosedur intervensi terhadap anak putus sekolah secara jelas.

Kedua, agar Bupati Bangka Tengah dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Anak Putus

Sekolah sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor instansi, baik untuk mencegah anak yang berpotensi putus sekolah ataupun anak yang telah putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah.

Ketiga, adanya intervensi konkret secara kolaboratif melalui Tim Satgas untuk menindaklanjuti data ril anak putus sekolah kurun waktu tiga tahun terakhir (2021-2023) dengan melibatkan pihak pemerintah desa, untuk mencapai target agar anak putus sekolah yang ada pada tiap desa dapat kembali bersekolah dan atau aktif mengikuti program kesetaraan pendidikan. (*/fh)